

## **BLOK CEPU**

## **Blora Serius Upayakan Dana Bagi Hasil Migas**

BLORA, KOMPAS - Pemerintah dan DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah, serta Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana Blora serius mengupayakan memperoleh dana bagi hasil minyak dan gas bumi Blok Cepu. Mereka akan menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, dan Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi di Jakarta, 21-22 Juni.

Pemerintah dan DPRD Kabupaten Blora mengirim Asisten II Sekretariat Daerah Blora Gunadi, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Adi Purwanto, dan anggota Komisi B DPRD Blora Seno Margo Utomo. Selain itu, juga mengirim Kunarto Marzuki dari Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) serta Ridaya La Ode Ngkowe, Koordinator Koalisi Nasional Tata Kelola dan Transparansi Migas Publish What You Pay (PWYP).

Pertemuan itu tanggapan atas Surat Bupati Blora Nomor 540/350/2010 tanggal 14 Mei kepada Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi. Surat itu berisi permintaan pengkajian ulang dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH migas) Blok Cepu.

Peneliti senior LPAW Blora sekaligus Koordinator Program Transparansi Migas, Kunarto Marzuki, Minggu (20/6), di Blora, mengatakan, dalam pertemuan itu Blora ingin mendiskusikan kemungkinan memperoleh DBH Blok Cepu. Selain itu, Blora akan meminta pemerintah pusat mendesak operator Blok Cepu, Mobil Cepu Limited (MCL), segera mengeksploitasi lapangan minyak di Blora.

Setahun ini, eksploitasi minyak bumi Blok Cepu telah dilaksanakan di lapangan minyak Banyuurip, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Produksinya baru mencapai 18.000 barrel per hari. Itu meleset dari proyeksi awal yang ditargetkan 20.000 barrel pada pertengahan 2008.

"Lantaran mulut sumur berada di Bojonegoro, Bojonegoro dan Pemprov Jatim mendapat penyertaan modal (PI) dan DBH, sedangkan Blora hanya mendapat PI (participating interest,

penyertaan modal),” kata dia.

Hal itu berdasarkan Pasal 14 UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal itu menyebutkan, bagi hasil pertambangan migas diberikan pusat kepada pemerintah daerah, yang wilayahnya sedang dieksplorasi atau memiliki mulut sumur.

Secara terpisah, Direktur PT Blora Patragas Hulu (BPH) Christian Prasetya membenarkan Blora hanya menerima PI Rp 235.662.000 atas hasil produksi minyak Blok Cepu September-November 2009. ”Karena itu, kami mendukung upaya pemerintah, DPRD, dan LSM di bidang migas, mengupayakan Blora memperoleh DBH.” (HEN)

Sumber : Kompas